

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Cekli Setya Pratiwi, 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*
- Darwan Prinst, 1995, *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Evita Isretno, 2020, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Cintya Press
- Filmon Mikson Polin, 2016, *Memahami Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Malang: Media Nusa Creative
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Persada.

Jurnal & Artikel

- Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D.L. Roeroe, Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia, *Lex Privatum 10*, vol 2, 2023
- Ira Sumaya dan Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tinjauan Hukum Regulasi dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Di Daerah, *Tulisan Hukum*, Vol 2, 2023
- Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan, diakses melalui: <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/> di akses pada tanggal 25 November 2025
- Widi Nur Aulia, Muhammad Abdullah Faqih, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana, "Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah," *Indonesian Journal of Public Administration Review* Vol 2, no. 4, 2025

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan:

1. Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT
2. Putusan Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT
3. Putusan Nomor 10 K/TF/2025